

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan topik utama dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa selalu aktual untuk dibicarakan, serta dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas dinamika kehidupan masyarakat. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan manusia yang berkualitas itu sendiri dapat dilihat dari segi pendidikannya (Hamalik, 2014: 1).

Berangkat dari keyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, maka peranan sistem pendidikan nasional dalam kehidupan suatu bangsa menjadi sangat dominan. Oleh sebab itu, pendidikan nasional harus selalu ditata agar benar-benar dapat menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Wahjoetomo, 1993: 6).

Sekolah merupakan salah satu wahana yang dijadikan tempat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sekolah akan melahirkan manusia-manusia yang terdidik, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mengantarkannya kepada peluang yang akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik kedepannya.

Sekolah yang diharapkan merupakan sekolah yang unggul, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ketika sekolah tersebut dilihat dari segi kualitasnya unggul, infrastruktur bangunannya bagus, fasilitas sekolah yang memadai, serta para tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, maka akan tercetak anak-anak didik yang unggul dan berkualitas. Begitu juga ketika dilihat dari segi kuantitasnya, semakin

banyak jumlah sekolah yang tersedia, maka akan semakin banyak pula anak-anak usia sekolah yang tertampung dan mempunyai akses untuk melanjutkan sekolah, mengenyam pendidikan, dan merasakan duduk di bangku sekolah.

Sudah banyak saat ini lembaga-lembaga yang dibentuk untuk ikut membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sebut saja misalkan, Indonesia Mengajar, Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, Tunas, Sekolah Gajah Wong, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dari semangat gerakan atau lebih menerapkan kebijakan *Movement*. Sehingga pegiat dan para aktivis pendidikan memiliki rasa peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Semua lembaga tersebut memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ikut andil dalam menuntaskan berbagai masalah pendidikan di Indonesia, terutama pada sumber daya manusianya.

Namun kenyataannya, saat ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia lebih cenderung menggunakan pendekatan program (*programmatic*), yaitu menekankan bahwa seluruh masalah pendidikan di Indonesia diselesaikan oleh pemerintah. Sedangkan lembaga-lembaga swasta yang ingin membantu dalam bidang pendidikan kurang diberikan ruang yang cukup oleh pemerintah untuk ikut dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia (Baswedan, 2013).

Di samping itu pemerintah juga kurang memberikan perhatian atau respon kepada lembaga-lembaga swasta tersebut. Baik berupa fasilitas infrastruktur hingga tunjangan yang layak bagi mereka yang sudah siap mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil bahkan pelosok untuk menjadi pengajar atau guru. Mereka terjun di tempat-tempat yang masih

jauh dari layak untuk akses pendidikannya. Jumlah sekolah yang minim dan guru yang masih sangat kurang.

Ketika pemerintah masih menerapkan kebijakan program (*programmatic*) dalam menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia, maka dampaknya adalah akan semakin banyak masalah pendidikan di Indonesia yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Karena rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap masalah pendidikan di Indonesia sangat rendah (Baswedan, 2013).

Dalam bidang politik, kita lihat telah dimatikannya kehidupan demokrasi. Demokrasi yang menjamin pluralitas atau kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakui keunikan kemajemukan dan perbedaan pendapat telah dimatikan sedemikian rupa. Dengan demikian, kehidupan bersama berdasarkan dialog dan tukar pikiran telah dikubur, sehingga usaha untuk memecahkan persoalan bersama telah diganti dengan cara-cara pemaksaan melalui berbagai instruksi atau peraturan dari penguasa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menentukan berbagai kebijakan baik di dalam kehidupan bersama maupun di dalam pemerintahan semakin lama semakin sempit. Masyarakat menjadi apatis, tidak kreatif dan inovatif, selalu menunggu petunjuk, serba *juklak* (petunjuk pelaksanaan) dan *juknis* (petunjuk teknis), dan berfikir procedural (Hasbullah, 2007: 12-13).

Hal yang lebih memprihatinkan, jumlah sekolah di Indonesia saat ini masih sangat minim. Berikut jumlah sekolah di Indonesia menurut jenjang dan statusnya pada tahun 2010.

Jumlah Sekolah Di Indonesia Tahun 2010.

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1.616	65.934	67.550
2	Sekolah Dasar	130.563	12.080	143.252
3	SMP	17.714	12.152	29.816
4	SMA	4.707	5.965	10.762
5	SMK	2.003	5.589	7.502
	Jumlah Sekolah	156.683	107.720	258.882

Sumber: **Statistik Pendidikan Kemendiknas, 2010**

Pada tahun 2013, jumlah SD mencapai 169 ribu, untuk SMP mencapai 39 ribu, sedangkan SMA mencapai 26 ribu (**Kemdikbud, 2013**). Secara statistik, jumlah sekolah yang ada di Indonesia dari tingkat dasar hingga menengah atas, mengalami kenaikan. Namun, dengan jumlah SD yang tidak seimbang dengan jumlah SMP dan SMA, maka akan banyak anak yang terancam tidak sekolah atau tidak mendapat akses layanan pendidikan di Indonesia. Karena jumlah sekolah yang tidak sebanding.

Hal tersebut ditambah dengan jumlah anak sekolah yang duduk di bangku kelas 1 SD saat ini berjumlah 5,6 juta, sedangkan jumlah anak yang lulus dari bangku SMA hanya 2,3 juta (**Kemdikbud, 2013**). Dari jumlah data tersebut, ada sekitar 3,3 juta anak tidak melanjutkan pendidikan atau dengan kata lain mereka tidak cukup mendapatkan akses layanan pendidikan. Padahal Indonesia disebut-sebut memiliki jumlah bonus demografi tinggi, jumlah anak usia produktif banyak namun tidak terdidik dan tidak mendapat cukup akses layanan pendidikan.

Masalah yang lain adalah faktor ketidakadilan yang berdampak terhadap rendahnya mutu pendidikan. Terjadinya berbagai gejala ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan dapat dijelaskan oleh teori “*dual system*” (Windham, 1990). Masyarakat seolah terpilah menjadi dua segmen yang terpisah, yaitu segmen miskin (*disadvantages*) dan segmen kaya (*advantages*). Yang kaya mendapatkan berbagai kemudahan dalam akses pendidikan, sedangkan yang miskin semakin tertinggal karena kurangnya fasilitas dan akses layanan pendidikan (Suryadi, 2014: 119).

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat permasalahan pendidikan di Indonesia yang semakin hari semakin kompleks dan butuh penanganan yang tepat. Salah satunya adalah dengan mengambil kebijakan yang sesuai dan yang paling dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja akses layanan pendidikan di Indonesia?
2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan program (*programmatic*)?
3. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*)?
4. Apa keunggulan dan kekurangan antara kebijakan pendekatan program (*programmatic*) dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*)?
5. Bagaimana hasil perbandingan efektifitas antara kebijakan pendekatan program (*programmatic*) dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*) dalam penyediaan akses layanan pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengkaji apa saja akses layanan pendidikan di Indonesia.
2. Ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan program (*programmatic*).
3. Ingin memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*).
4. Ingin menganalisis apa keunggulan dan kekurangan antara kebijakan pendekatan program (*programmatic*) dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*).
5. Ingin mengidentifikasi mana yang lebih efektif antara kebijakan pendekatan program (*programmatic*) dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*) dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan sebagai wacana baru dalam bidang kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu solusi terhadap problematika pendidikan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan dapat mengambil kebijakan yang sesuai dan lebih dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para pemangku kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Agar apa yang diputuskan dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kebijakan dalam bidang pendidikan.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai susunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang berisi antar bagian atau antar bab. Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari V bab:

Bab I berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan peneliti.

Bab IV menjelaskan tentang efektifitas kebijakan pendekatan *programmatic* dengan pendekatan *movement* dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan rekomendasi-rekomendasi dari peneliti baik kepada pemerintah dalam hal ini adalah kementerian pendidikan maupun kepada lembaga-lembaga sumber daya masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.